

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN WAR *ON DRUGS* DI THAILAND**

Seperti yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya terkait bagaimana kondisi kebijakan War On Drugs Thailand yang telah banyak ditemukan kasus-kasus kejahatan yang disponsori oleh otoritas negara kepada warga sipil. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebijakan War On Drugs yang bersifat represif sejak pertama kali pelaksanaannya dua dekade silam. Penangkapan sewenang-wenang dan pembunuhan diluar hukum adalah beberapa contoh dari pelanggaran HAM oleh otoritas Thailand dalam kampanye anti narkoba.

Dalam bab ini akan dibahas lebih dalam mengenai peredaran narkoba dan kondisi domestik Thailand beserta bentuk pemerintahannya. Selain itu, pada bab ini pula akan digambarkan bagaimana kondisi beserta fakta-fakta pelaksanaan kampanye anti narkoba dari tahun ke tahun. Gambaran singkat terkait campur tangan dan advokasi dari salah satu organisasi internasional non-pemerintah yakni Human Rights Watch juga akan disinggung pada bab ini.

#### **2.1 Peredaran Narkoba di Thailand**

Secara umum, narkoba adalah jenis zat yang apabila dikonsumsi, dapat membawa pengaruh tertentu terhadap tubuh si pemakai. Heroin, opium, kokain, metamfetamin adalah beberapa contoh jenis narkoba yang banyak beredar di pasaran. Di era globalisasi ini, peredaran narkoba telah menjadi salah satu permasalahan kompleks di

banyak negara. Salah satu alasan yang mendasari adalah karena peredaran narkoba dilakukan tidak hanya melibatkan antarmanusia saja, melainkan sudah mencapai antarnegara. Jaringan para pengedar narkoba meluas tidak hanya pada satu negara saja. Dengan ini, peredaran narkoba yang melampaui lintas batas negara juga disebut sebagai kejahatan transnasional. Dalam mendistribusikan narkotika, para pengedar biasanya memanfaatkan celah-celah tersembunyi dengan menyelundupkan benda terlarang ini bersamaan dengan perdagangan barang maupun jasa. Terlebih lagi, mayoritas sindikat narkoba yang sudah lama berkecimpung dalam industri gelap ini memanfaatkan jalur laut untuk pendistribusian narkoba. Menurut fakta di lapangan, hal ini dikarenakan pihak berwenang di kawasan perbatasan cenderung lalai saat melakukan pengecekan (Dasmi, Sulistyono, & Simbolon, 2021).

Salah satu jalur laut yang dikenal sebagai pusat produksi narkotika terbesar di wilayah Asia Tenggara yaitu segitiga emas. Wilayah ini terbentang seluas 950.000 km<sup>2</sup> dan terletak diantara tiga negara di kawasan Asia Tenggara yakni Thailand, Laos, dan Kamboja. Selain itu, segitiga emas ialah wilayah yang terletak diantara dua sungai yakni Sungai Mekong dan Sungai Mae Sai yang menghasilkan sebanyak 60% produksi narkoba jenis opium dan heroin di dunia. Pada awalnya, wilayah segitiga emas dikenal sebagai kawasan penghasil narkoba jenis opium yang terbesar di Asia Tenggara, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zat-zat baru, wilayah ini mulai memproduksi narkoba jenis lain yakni metamfetamin (Kanato, Leyatikul, & Choomwattana, 2017).

Pada masa setelah Perang Dingin, wilayah segitiga emas, khususnya Thailand menjadi pusat produksi hingga distribusi benda-benda terlarang, salah satunya opium yang menjadi jenis utama. Terlebih lagi, Thailand juga berperan sebagai negara transit dari banyak sindikat narkoba yang akan memasarkan benda-benda terlarang tersebut ke pasar internasional. Sehingga hal ini kemudian berkontribusi besar pada kedudukan Thailand sebagai negara peringkat pertama di Asia Tenggara sebagai negara penghasil narkoba jenis opium terbesar dan mengalami lonjakan pada rentang tahun 2018 hingga 2020. Mengutip data dari suatu jurnal, pada tahun 2018, peredaran narkoba jenis opium mencapai 197.787 kasus di Thailand. Jumlah tersebut kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi sebanyak 247.796 kasus peredaran narkoba jenis opium. Pada tahun 2021, peredaran opium di Thailand mengalami penurunan, akan tetapi jumlahnya tidak signifikan yakni sebesar 211.372 kasus (Dasmi, Sulisty, & Simbolon, 2021).

Kemudian, data serupa juga dinyatakan dalam ASEAN Drug Monitoring Report tahun 2020 untuk wilayah Thailand. Laporan ini menyebutkan bahwa selama beberapa tahun ke belakang, wilayah segitiga emas mengalami peningkatan yang signifikan dalam produksi narkoba sintetis, seperti metamfetamin, heroin, dan ketamine. Selain itu, jejaring perdagangan narkoba juga semakin banyak yang menyelundupkan benda-benda terlarang tersebut melalui Thailand sebagai pusat transit utama. Salah satu contohnya adalah narkoba jenis kokain yang dibawa oleh sindikat narkoba dari Afrika. Pada tahun 2019, pihak berwenang berhasil mengamankan sebanyak 24 kilogram kokain yang ditemukan di Thailand. Kemudian, pada tahun 2020, terdapat sedikit

peningkatan yakni sebanyak 25.52 kilogram narkoba jenis kokain. Namun, jumlah tersebut masih dalam prevalensi yang rendah karena harga kokain yang sangat mahal dan hanya bisa dijangkau oleh masyarakat kaya saja. Beberapa metode penyembunyian narkoba yang sering ditemukan di Thailand adalah menggunakan kompartemen rahasia dalam sebuah truk hingga menyembunyikan narkoba ke dalam sebuah karung dan dikirim menggunakan jasa pos parcel (Kanato, Sarasiri, & Leyatikul, 2021).

Selain itu, mengutip dari jurnal karya Indah Puspita Sari berjudul Peranan ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) Dalam Penanggulangan Narkotika di Thailand, menyatakan bahwa peredaran narkoba di Thailand menjadi perhatian dunia internasional karena Thailand adalah negara penting yang berperan sebagai penghasil narkoba terbesar di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, berangkat dari kondisi tersebut, Thailand bersama dengan negara di kawasan segitiga emas lainnya mulai mengintensifkan kerjasama mereka untuk mencegah meluasnya jaringan-jaringan peredaran narkoba yang menggunakan wilayah ini sebagai rute utama untuk pendistribusian benda-benda terlarang.

## **2.2 Kondisi Domestik Thailand dan Bentuk Pemerintahannya**

Thailand merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Memiliki sebutan sebagai Negeri Gajah Putih, pada awalnya Thailand bernama Siam. Mereka baru mengganti nama negaranya menjadi “Thailand” pada tahun 1939. Dengan populasi penduduk yang cukup besar yakni sekitar tujuh puluh juta jiwa, Thailand terbagi atas beberapa kelompok penduduk yakni Thai Pusat, Thai Timur Laut (Thai

Lao/Isan), Thai Utara, dan Thai Selatan (Busrowi, 2008). Kelompok masyarakat Thai Pusat banyak mendominasi bidang pemerintahan, ekonomi, dan budaya di Thailand. Mayoritas dari mereka bertempat tinggal di Bangkok yang juga menjadi Ibu Kota dari negeri Gajah Putih ini. Thailand dihuni oleh sekitar 6%-14% masyarakat beretnis Cina yang memiliki peran besar dalam perekonomian mereka, khususnya di bidang perdagangan (Busrowi, 2008).

Menarik garis ke belakang sedikit, Thailand mulai membangun negaranya dengan bentuk kerajaan pada tahun 1932. Sejak saat itu, Thailand menggunakan sistem monarki konstitusional. Monarki konstitusional sendiri ialah sebuah sistem pemerintahan di mana Raja berperan sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Mereka semua bertindak atas dasar konstitusi Thailand. Dalam kurun waktu tersebut terjadi perubahan politik yang begitu penting di Thailand yakni terjadinya kudeta untuk menjatuhkan pemerintahan monarki absolut dan mengusung demokrasi sebagai sistem pemerintahannya (Zuhro, 1995).

Kudeta besar ini terjadi antara kelompok militer yang mengatasnamakan masyarakat sipil atas ketidakpuasan mereka terhadap kerajaan yang kala itu berkuasa yakni Dinasti Chakri, masa dimana modernisasi di Thailand dimulai. Peristiwa ini juga dikenal sebagai Revolusi Siam (Fatimah, 2018). Kala itu, Dinasti Chakri merombak seluruh sektor keuangan dan administrasi di Thailand yang berimbas pada meningkatnya dominasi negara. Hal inilah yang kemudian menyulut amarah dari

kelompok militer atas nama masyarakat sipil untuk melakukan gerakan perlawanan guna meruntuhkan rezim monarki absolut yang kala itu berkuasa.

Pada akhirnya, ketika monarki absolut berhasil diruntuhkan, perubahan politik terjadi di Thailand yakni diterapkannya sistem monarki konstitusional dengan junta militer sebagai kelompok dominan di dalamnya (Hewison, 1997). Junta militer menguasai pemerintahan di Thailand selama 60 tahun lamanya. Pasca kudeta seiring dengan dijalankannya sistem monarki konstitusional ternyata tidak semata-mata menjadi jalan keluar akan berakhirnya kudeta di Thailand. Justru pelaksanaan sistem monarki konstitusional menjadi awal baru bagi kemunculan kudeta-kudeta lain antara kalangan militer dengan para elit birokrat di Thailand atas dasar perebutan kekuasaan. Para kalangan elit birokrat menganggap bahwa keikutsertaan kalangan militer dalam dunia politik merupakan hal yang salah dan harus dihentikan. Sehingga roda pemerintahan pasca berakhirnya sistem monarki absolut hanya berputar pada pertempuran kepentingan politik antara kalangan militer dengan kaum elit birokrat saja. Kudeta semacam ini seakan menjadi momentum yang tidak dapat terhindarkan setiap perubahan pemerintahan di Thailand. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut menjadi sebuah siklus dalam dinamika politik di Thailand setiap menjelang pemilu (Fatimah, 2018).

Setelah berkuasa selama 60 tahun, pada akhirnya kedudukan junta militer berhasil diruntuhkan oleh masyarakat sipil. Dimulai tepatnya pada tahun 1977, pemerintahan sipil mulai beroperasi dibawah sistem parlementer. Tujuan dari ditegakkannya sistem

pemerintahan parlementer di Thailand ialah untuk membangun demokrasi. Keseriusan pemerintahan parlementer kala itu untuk mendorong Thailand menjadi negara demokratis terlihat dari pemilihan legislatif, pemberlakuan konstitusi demokrasi, kebebasan politik, bahkan kemunculan partai politik yang sudah dilegitimasi. Hal ini tentunya menjadi permulaan yang baik dalam rangka demokratisasi Thailand.

Akan tetapi, setelah berhasil menduduki roda pemerintahan Thailand selama kurang lebih 14 tahun sejak 1977, pada tahun 1991, junta militer kembali melakukan pemberontakan kepada pemerintahan sipil. Mereka memulai kudeta lagi untuk merebut kekuasaan agar menjadi dominasi mereka kembali sepenuhnya. Namun ternyata upaya perebutan kekuasaan oleh junta militer kala itu tidak membuahkan hasil karena terjadi demonstrasi besar dalam rangka penuntutan reformasi demokratis. Peristiwa ini mendapat dukungan dari Perdana Menteri Chatichai karena sejak 1989, ia berusaha memperkuat kekuasaannya agar lebih dominan dibanding junta militer. Ambisi perdana menteri tersebut juga diiringi oleh raja yang kala itu memimpin. Di tengah demonstrasi besar tersebut, Raja Thailand mengambil langkah penting yang pada akhirnya berhasil membuat junta militer memisahkan diri dari dunia politik Thailand (Fatimah, 2018).

Thailand memasuki era sistem pemerintahan baru pada tahun 1994 yang ditandai dengan terbentuknya *Democratic Development Committee* (DDC). DDC didirikan oleh Perdana Menteri Chuan Leekpai dan menjadi titik awal terjadinya perubahan konstitusi yang lebih demokratis pada tahun 1997. Namun, seperti yang diketahui bersama bahwa

demokrasi bukan hanya meliputi pemilihan wakil rakyat saja, masih banyak sekali aspek penunjang lain dalam suatu negara untuk sepenuhnya dikatakan memiliki pemerintahan yang demokratis. Beberapa contoh aspek lainnya ialah kebebasan berekspresi, pers yang bebas, dan masyarakat sipil yang aktif.

Terpilihnya Thaksin Shinawatra pada 9 Februari 2001 sebagai perdana menteri pertama yang menempuh proses pemilihan terbuka telah cukup banyak membenahi perjalanan demokrasi di Thailand. Mengutip pendapat Ji Ungpakorn dalam karyanya berjudul *The Struggle for Democracy and Social Justice in Thailand*, ia menyatakan bahwa selama berada dibawah kepemimpinan Thaksin Shinawatra, Thailand telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan oleh karena keberhasilan demokratisasi yang dilakukan oleh Thaksin. Dibawah kepemimpinannya, masyarakat disana menunjukkan partisipasi yang sangat aktif, salah satunya lewat aksi demonstrasi di mana mereka menjadi sangat vokal dalam berkampanye melindungi kepentingan orang-orang miskin. Selain itu, kebebasan media pers juga terlihat semakin jelas (Ungpakorn, 1997).

Di tengah kepemimpinannya yang bergerak menunjukkan berbagai kemajuan terhadap demokrasi, Thailand yang juga dijuluki sebagai “negara 1001 kudeta” kembali mendapat pemberontakan dari kalangan militer pada tahun 2006. Mereka memiliki tujuan untuk menggulingkan kepemimpinan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Kudeta ini kemudian menimbulkan perpecahan dan krisis politik di Thailand. Pada akhirnya, junta militer kembali mengganti konstitusi yang berlaku pada



tahun 1997 dengan konstitusi baru tahun 2007 dan mereka juga berusaha menggarisbawahi kesalahan-kesalahan yang dilakukan Thaksin selama kepemimpinannya.

Gambar 2. 1 Pro Thaksin vs. Anti Thaksin

**Table 1: Pro-Thaksin vs. Anti-Thaksin, the Structure of the Conflict**

	Pro-Thaksin (former Prime Minister) faction	Anti-Thaksin faction
<b>Movement organization</b>	UDD (United Front for Democracy against Dictatorship)	PAD (People's Alliance for Democracy)
<b>Symbol color</b>	Red	Yellow
<b>Supporting classes</b>	Lower classes	Middle/upper classes
<b>Force in Parliament</b>	Pheu Thai Party (opposition)	Democrat Party etc. (in power)

Source: Author

Sumber: <https://www.ide.go.jp/English/Research/Region/Asia/20100524.html>

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa penggulingan kepemimpinan Thaksin Shinawatra berimbas pada terpecahnya masyarakat Thailand menjadi dua kubu pro dan kontra. Kubu pro disebut sebagai kubu kaos merah sebagai kelompok yang pro demokrasi atau pro terhadap pemerintahan Thaksin. Mereka kemudian memiliki aliansi politik yang disebut sebagai Partai *Pheu Thai* atau Partai Untuk Thailand. Sedangkan kubu kontra disebut sebagai kubu kaos kuning yang dipimpin oleh *People's Alliance for Democracy* (PAD) yang terdiri dari kalangan militer dan para elit politik (Fatimah, 2018). Di bawah kepemimpinan seorang raja, masyarakat Thailand

sangat erat dengan konsepsi bahwa raja dianggap sebagai pencipta dan pelindung sistem hukum yang harus selalu mereka hormati segala keputusannya (Engel, 1975).

### **2.3 Pelaksanaan *War On Drugs* dari Tahun ke Tahun**

Kampanye anti narkoba yang dimulai di Thailand pada 1 Februari 2003 dibawah PM Thaksin Shinawatra menuai kecaman dari berbagai pihak. Pelaksanaannya yang kontroversial disebabkan oleh penggunaan berbagai bentuk kekerasan oleh jajaran pemerintah dalam upayanya menumpaskan peredaran narkoba di negaranya. Tindakan keras yang dilancarkan Thaksin melalui kampanye anti narkoba tersebut merupakan respon atas peningkatan jumlah narkoba jenis metamfetamin. Mengutip dari sumber media lokal pada saat itu, Thaksin bahkan pernah mengatakan bahwa dalam perang tersebut, para pengedar narkoba harus mati (Bangkok Post Editorial, 2023).

Pelaksanaan kebijakan *War On Drugs* tahun 2003 dibawah Thaksin Shinawatra terdiri atas tiga pilar utama yakni pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, serta penindasan (Jahangir, 2004). Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang Diplomat Ahli Madya, yang berada di Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI, beliau menjelaskan secara singkat mengenai kondisi perang melawan narkoba di Thailand yang diterapkan sejak 1 Februari 2003 silam. Dibawah kepemimpinan Thaksin Shinawatra, Abdul Gafur membenarkan fakta bahwa Thaksin menuai beragam kritik karena kebijakan perang melawan narkoba yang dijalankan berimbas pada kasus kematian pada kurang lebih

2.800 jiwa. Dalam wawancara tersebut, kekejaman Thaksin melalui kebijakan perang melawan narkoba beliau sebut juga sebagai *military-style booth camp*.

Sejak saat itu, berita-berita di media massa dan media internet dipenuhi oleh berbagai tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh otoritas negara Thailand sebelum pada akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pemblokiran terhadap beberapa situs internet yang diketahui aktif mempublikasi pelanggaran HAM oleh otoritas negara Thailand. Mulai dari pembunuhan diluar proses hukum, penganiayaan, dan penangkapan sewenang-wenang menyebabkan ribuan korban tewas dalam kampanye anti narkoba tersebut. Banyak organisasi lokal hingga internasional yang turut memberikan atensi mereka terhadap pelaksanaan perang melawan narkoba Thaksin agar segera dihentikan dan mengadili para pelaku sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Kampanye anti narkoba yang dijalankan Thaksin telah gagal dilaksanakan karena tidak dapat memutus rantai peredaran narkoba di negaranya. Hal ini merupakan bukti bahwa penerapan kebijakan anti narkoba yang berorientasi pada kekerasan fisik bukan cara yang tepat untuk diterapkan karena tidak menyelesaikan permasalahan dari akarnya (Amnesty International, 2003).

Dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha yang dimulai pada tahun 2019, kampanye anti narkoba masih terus dilakukan dengan berorientasi pada penggunaan kekerasan. Pelaksanaan perang melawan narkoba dibawah Prayuth Chan-Ocha dinilai telah memberikan kewenangan yang terlalu besar pada aparat kepolisian

untuk menopang segala tindakan yang diperlukan untuk menumpaskan isu narkoba ini (Organized Crime and Corruption Reporting Project, 2020).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Abdul Gafur, beliau juga menuturkan bahwa terdapat sekitar 100.000-250.000 orang disana yang mengkonsumsi narkoba jenis heroin dan metamfetamin. Di Thailand sendiri, narkoba jenis metamfetamin juga dikenal dengan istilah *yaa baa* tau *crazy pill*. Ia kemudian menambahkan fakta bahwa penggunaan narkoba yang semakin masif di Thailand pada akhirnya menyebabkan berkembangnya virus HIV/AIDS. Hal ini kemudian juga menjadi ranah bagi Thai Red Cross Society yang kemudian juga turut mengimbau pemerintah Thailand agar mulai memfokuskan orientasi kebijakan pada pemberian fasilitas pengobatan daripada penghukuman yang bersifat represif.

Melalui peneliti senior HRW untuk divisi Asia yakni Sunai Phasuk, ia mengecam dengan tegas pelaksanaan War On Drugs dibawah Prayuth Chan-Ocha tahun 2019 silam. Prayuth Chan-Ocha dinilai hanya semakin memperburuk pelaksanaan HAM di Thailand oleh karena kampanye anti-narkobanya. Kekejaman PM Prayuth Chan-Ocha terlihat pada publikasi berdasarkan hasil penelitian Sunai Phasuk di Provinsi Nakhon Phanom. Disana, ia mendapati bahwa aparat kepolisian melakukan serangan atas tuduhan penjualan metamfetamin di beberapa rumah disana. Kemudian, aparat mulai menindak pihak-pihak tertuduh dengan melibatkan penggunaan kekerasan fisik meliputi aksi memukul, menginjak dada, hingga menendang kepala. Tindak kekerasan

tersebut menyebabkan satu korban tewas karena adanya cedera pada otak dan dada yang sangat parah (Organized Crime and Corruption Reporting Project, 2020).

Mengutip laporan tahunan yang diterbitkan oleh War On Drugs mengenai situasi pelaksanaan HAM di Thailand tahun 2022 silam, HRW juga menemukan bahwa aparat kepolisian Thailand masih sering ditemui melakukan operasi anti narkoba tanpa perlindungan yang efektif terhadap berbagai aksi penyiksaan dan pelanggaran. Pada bulan Agustus 2021, Human Rights Watch mendokumentasikan penyiksaan yang dilakukan oleh unit kepolisian di Provinsi Nakhon Sawan dan menyebabkan korban meninggal dunia. Aparat tersebut kemudian diberi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan aksi pembunuhan (Human Rights Watch, 2022).

Berkaca dari kegagalan kampanye anti narkoba Thaksin dua dekade silam, perdana menteri Thailand yang baru memulai pemerintahannya pada tahun 2023, Srettha Thavisin, menyatakan bahwa pihaknya akan menjadikan pemberantasan narkotika sebagai agenda nasional. Srettha juga menambahkan bahwa pemberantasan narkoba dibawah kepemimpinannya akan diterapkan dalam jangka waktu empat tahun. Berita tersebut lantas mendapat berbagai reaksi dari masyarakat dan kalangan aktivis HAM. Salah satu respon datang dari Direktur Cross Cultural Foundation yang juga merupakan seorang aktivis HAM, Pornpen Khongkachonkiet, bahwa kebijakan pemberantasan narkoba ini mengingatkannya pada warisan buruk Thaksin Shinawatra dua dekade silam dan khawatir sejarah War On Drugs 2003 akan kembali terulang.

Srettha Thavisin sebagai perdana menteri yang baru sepatutnya menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran bahwa reaksi keras yang mengutamakan penggunaan kekerasan fisik disertai ancaman tidak akan menyelesaikan permasalahan kompleks, salah satunya adalah peredaran narkoba. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye anti narkoba dibawah PM Srettha Thavisin berkomitmen untuk membendung peredaran berbagai jenis narkoba dalam jangka waktu empat tahun. Dalam hal ini, Srettha mengajak seluruh masyarakat Thailand untuk bergabung menyukseskan salah satu agenda nasional ini (EFE, 2023).

Dalam pelaksanaan perang melawan narkoba yang baru ini, pemerintahan Thailand memiliki prioritas yakni bukan untuk memusnahkan semua pihak yang diketahui memiliki sangkut paut dengan narkoba, melainkan adalah untuk memutus lingkaran masalah narkoba dari akarnya. Pada kesempatan pertemuan Komite Pemerintah untuk Pemberantasan Narkoba, prioritas tersebut dinyatakan secara langsung oleh PM Srettha Thavisin. Ia juga menambahkan bahwa penting untuk dilakukan, pemberantasan narkotika harus dimulai dari akarnya yakni mulai dari aksi penyelundupan, hingga kecanduan narkoba (Charoensuthipan, 2023).

Awal perjuangan baru dalam pemberantasan narkoba ingin diwujudkan Srettha Thavisin melalui serangkaian upaya, salah satunya dengan mempersingkat proses penyitaan aset para pengedar narkoba. Proses penyitaan aset adalah hal yang paling ditakuti oleh para pengedar narkoba. Maka dari itu, Srettha Thavisin meyakini bahwa langkah ini sangat penting untuk dilakukan karena berperan untuk memutus jaringan

mereka. Pada tahun pertama pelaksanaan perang melawan narkoba ini, Srettha Thavisin memfokuskan langkahnya untuk terlebih dahulu memberantas segala bentuk penyelundupan narkoba. Menurutnya, langkah ini adalah yang paling mendasar untuk mencegah narkoba dapat menjangkau masyarakat Thailand. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Thailand, Anutin Charnvirakul menyatakan bahwa kementerian akan sepenuhnya memberi dukungan pada aksi pemberantasan narkoba ini dengan cara mempercepat pemberantasan penyelundupan narkoba di tingkat provinsi dan akan segera melapor kembali pada Perdana Menteri. Akan tetapi, Anutin berpendapat bahwa penetapan tenggat waktu untuk menyelesaikan permasalahan kompleks seperti peredaran narkoba hanya akan membuatnya gagal, mengingat terdapat begitu banyak komponen yang harus diberantas hanya dalam jangka waktu empat tahun (Charoensuthipan, 2023).

#### **2.4 Human Rights Watch Sebagai TAN**

*Human Rights Watch* ialah sebuah organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia yang bersifat non-profit atau bisa juga disebut sebagai INGO atau *International Non-Governmental Organization*. Organisasi ini bersifat independen, dalam artian, HRW tidak menerima bantuan dana dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, aliran dana HRW dalam menjalankan tugasnya berasal dari kontribusi individu maupun yayasan swasta yang ada di seluruh dunia. Tidak hanya dalam hal pendanaan saja, independen disini juga diartikan bahwa dalam menjalankan tugas mereka, negara tidak diperkenankan mengganggu proses yang

sedang mereka lakukan. Hal ini dapat dijamin karena *Human Rights Watch* sangat menjaga objektivitasnya dengan mempertahankan standar tinggi keadilan dan ketepatan, termasuk juga di dalamnya dengan memperhatikan pertimbangan dari beberapa perspektif untuk benar-benar menangkap apa yang menjadi permasalahan dalam negara tujuan (Hermawan, 2014).

HRW memiliki markas besar di kota New York, Amerika Serikat dan terdiri atas para pakar, pengacara, jurnalis, dan akademisi dari berbagai latar belakang dan bersatu untuk tujuan yang sama yakni memberantas berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Disebut juga sebagai lembaga advokasi internasional yang berfokus pada isu-isu pelanggaran HAM, HRW berpegang pada satu prinsip dasar yakni bahwa hak asasi harus dapat dinikmati oleh semua orang tanpa memandang status, kelas, etnis, suku bangsa, agama, dan lain sebagainya. Mengemban tugas sebagai penegak HAM, *Human Rights Watch* meyakini bahwa ketika semakin banyak pelanggaran HAM yang dibawa ke pengadilan internasional, akan banyak pula kontribusinya pada penyelesaian berbagai masalah HAM di seluruh dunia. Dalam rangka membawa kasus-kasus pelanggaran HAM mencapai pengadilan internasional, HRW menggunakan upaya penerapan R2P atau *Responsibility to Protect* di beberapa negara tempat mereka beroperasi (Ula, 2017).

Selain prinsip tersebut, HRW sendiri juga merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memiliki andil begitu besar dalam berbagai tindakan untuk mengupayakan tercapainya hak asasi manusia yang seimbang bagi



seluruh individu melalui berbagai cara, beberapa diantaranya adalah mencegah adanya tindakan diskriminasi, menjaga kebebasan berpolitik bagi setiap individu, melindungi semua orang dari tindakan yang tergolong tidak manusiawi, dan sama seperti yang sudah disinggung pada bagian sebelumnya yakni membawa berbagai kasus pelanggaran HAM ke ranah pengadilan internasional (Hermawan, 2014).

Untuk mendukung tercapainya upaya-upaya tersebut dan menyukseskan setiap agenda yang mereka bawa bagi suatu negara, *Human Rights Watch* secara rutin menerbitkan laporan maupun *briefing* mengenai pembaruan kondisi hak asasi manusia untuk lebih dari 90 negara tempat mereka beroperasi. Tidak hanya itu, laporan rutin yang mereka keluarkan juga merupakan hasil dari investigasi HRW terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di negara tertentu yang juga mereka sertai dengan fakta-fakta terkait isu tersebut (Human Rights Watch, 2016).

Selain dalam bentuk laporan, mereka juga secara aktif mengeluarkan liputan berskala lokal maupun internasional mengenai berbagai informasi terkait HAM di berbagai negara. Oleh karena itu, pada banyak kesempatan, *Human Rights Watch* mampu menarik atensi dan kemudian merangsang adanya partisipasi dari masyarakat terkait agenda yang mereka rancang untuk memperjuangkan penegakan hak asasi manusia kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini, HRW juga tidak jarang memanfaatkan berbagai teknologi informasi yakni dengan cara mempublikasi artikel-artikel menggunakan media internet.

Didirikan pada akhir tahun 1970-an, latar belakang utama dibentuknya *Human Rights Watch* pada dasarnya adalah respon atas adanya pergeseran politik radikal di Amerika Serikat dan menyebabkan HAM menjadi perhatian internasional. Pergeseran politik yang terjadi pada tahun 1981 di Amerika Serikat ini dapat diringkas menjadi total tiga peristiwa penting. Yang pertama adalah administrasi carter yang pro HAM di tengah pemerintahan Ronald Reagan yang mulanya meremehkan HAM. Kemudian yang kedua ialah adanya peningkatan kebutuhan untuk menindak berbagai pelanggaran HAM akibat perang Amerika Tengah pada tahun 1980-an. Pembentukan HRW ternyata juga sedikit banyak dipengaruhi oleh didirikannya *Americas Watch* sebagai respon atas terjadinya perang saudara berdarah di Amerika Tengah. Kemudian, peristiwa yang terakhir ialah perkembangan organisasi yang mulai menunjukkan adanya pertarungan politik dengan pemerintahan Ronald Reagan (Neier, 2013).

Pada dasarnya, *Human Rights Watch* adalah bentuk pembaharuan dari organisasi sebelumnya yang bernama *Helsinki Watch* yang berdiri pada tahun 1978. Helsinki Watch sendiri juga merupakan organisasi non-pemerintah yang tujuan pendiriannya adalah untuk memonitori kepatuhan Uni Soviet terhadap perjanjian Helsinki tahun 1975. Perjanjian Helsinki itu sendiri berisikan tiga poin yang menjadi prioritas Uni Soviet bagian timur dan barat yakni kerja sama, keamanan, dan hak asasi manusia. Perjanjian Helsinki dijadikan sebagai pertanda akan kesepakatan Uni Soviet timur dan barat untuk menjalin hubungan budaya yang baik untuk dapat mendekatkan Uni Soviet dengan Amerika Serikat.

Dalam kurun waktu beberapa dekade, *Human Rights Watch* sudah mulai beroperasi di Thailand tidak lama setelah mereka didirikan yakni tahun 1978. Pada mulanya, kehadiran HRW di Thailand berfungsi untuk memantau perkembangan hak asasi manusia di negeri Gajah Putih tersebut. Namun seiring dengan perkembangan waktu, HRW menemukan beberapa penyelewengan terhadap HAM yang dilakukan oleh otoritas negara di Thailand, sehingga mereka mulai aktif menjalankan kampanye dan melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi di Thailand seperti diskriminasi, penganiayaan, pembunuhan diluar proses hukum, penahanan sewenang-wenang, dan isu terkait kebebasan berpendapat oleh masyarakat dan media pers (Human Rights Watch, 2004).